

**PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PROYEK  
ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) STUDI KASUS: RENCANA  
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GEOTHERMAL  
DI NAGARI PANDAI SIKEK**

**Dewi Rahmawati<sup>1</sup> & Rahmadhona Fitri Helmi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia  
Email Korespondensi: [dewi44231@gmail.com](mailto:dewi44231@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines community resistance to the planned geothermal exploration and exploitation project in Nagari Pandai Sikek, Tanah Datar Regency, West Sumatra, Indonesia. The research is grounded in the context of Indonesia's significant geothermal potential and the government's commitment to developing renewable energy sources. However, such projects often face opposition from local communities who perceive threats to their environment, social structure, and cultural heritage. The objective of this research is to describe the forms of resistance carried out by the Pandai Sikek community against the geothermal project and to analyze them using James C. Scott's theory of resistance. This study employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation from key informants and supporting informants, including community members, village officials, relevant government agencies, and the project developer. The findings reveal two main forms of resistance: open resistance (public transcript) and hidden resistance (hidden transcript). Open resistance includes demonstrations, banners, public statements, and formal rejection letters, while hidden resistance manifests through gossip, satire, silent boycotts, and the spread of negative issues. The resistance is driven by concerns over environmental degradation, loss of water sources, potential natural disasters, threats to communal land rights, limited public consultation, and the lack of meaningful community involvement in decision-making. Internal conflicts within the community and between local leaders and residents further intensify the opposition. In conclusion, the patterns of resistance observed align with Scott's concept, where subordinate groups employ both public and covert strategies to defend their living space and local wisdom. This study highlights that the success of renewable energy projects, particularly geothermal development, depends not only on technical and economic feasibility but also on fostering transparent communication, ensuring meaningful public participation, and respecting local socio-cultural and ecological values.*

**Keywords:** *Community, Community Resistance, Renewable Energy, Geothermal*

**PENDAHULUAN**

Krisis energi global, degradasi lingkungan, dan meningkatnya emisi karbon mendorong berbagai negara untuk beralih pada sumber energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang terbatas sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim. EBT memiliki karakteristik rendah emisi serta dapat diperbaharui, sehingga sejalan dengan agenda transisi energi menuju pembangunan berkelanjutan (Sarante, 2024).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan EBT melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang

menekankan diversifikasi energi dan prioritas pemanfaatan EBT. Target bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 menjadi pendorong percepatan transisi energi. Komitmen ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang konservasi energi serta Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 yang menitikberatkan pada percepatan pengembangan infrastruktur dan kelembagaan EBT (Sarante, 2024).

Salah satu sumber EBT yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah energi panas bumi (geothermal). Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Desember 2020, potensi panas bumi Indonesia mencapai 23,7 GW, menjadikannya negara dengan potensi terbesar kedua di dunia. Sumatera Barat sendiri memiliki potensi sebesar 1.680 MW, namun pemanfaatannya masih terbatas pada beberapa titik seperti Muara Laboh di Kabupaten Solok Selatan dan Bonjol di Kabupaten Pasaman. Pemanfaatan potensi ini diharapkan dapat mendukung ketahanan energi sekaligus mengurangi emisi karbon (ebtke.esdm.go.id, 2020).

**Tabel 1. Total Potensi Panas Bumi di Indonesia**

No	Wilayah	Provinsi	Total (MW)
1	Sumatera	Aceh	1086
2	Sumatera	Sumatera Utara	2026
3	Sumatera	Sumatera Barat	1680
4	Sumatera	Riau	45
5	Sumatera	Jambi	812
6	Sumatera	Bengkulu	764
7	Sumatera	Bangka Belitung	105
8	Sumatera	Sumatera Selatan	1241
9	Sumatera	Lampung	1758
10	Jawa	Banten	651
11	Jawa	Jawa Barat	4763
12	Jawa	Jawa Tengah	1342
13	Jawa	D.I Yogyakarta	10
14	Jawa	Jawa Timur	1284
15	Bali-Nusa Tenggara	Bali	335
16	Bali-Nusa Tenggara	NTB	175
17	Bali-Nusa Tenggara	NTT	1223,5
18	Kalimantan	Kalimantan Barat	65
19	Kalimantan	Kalimantan Timur	17
20	Kalimantan	Kalimantan Utara	43
21	Kalimantan	Kalimantan Selatan	50
22	Sulawesi	Sulawesi Utara	838
23	Sulawesi	Gorontalo	160

24	Sulawesi	Sulawesi Tengah	833
25	Sulawesi	Sulawesi Selatan	516
26	Sulawesi	Sulawesi Tenggara	318
27	Sulawesi	Sulawesi Barat	406
28	Maluku-Papua	Maluku Utara	576
29	Maluku-Papua	Maluku	568
30	Maluku-Papua	Papua Barat	75
<b>Total</b>			<b>23.765,5</b>

Meski potensinya sangat besar, pemanfaatan energi panas bumi kerap diwarnai konflik sosial. Beberapa proyek geothermal di Indonesia mendapat penolakan masyarakat karena dinilai mengancam kelestarian lingkungan, mengabaikan hak atas tanah ulayat, dan tidak memberikan manfaat langsung bagi warga lokal. Minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan menjadi salah satu faktor utama pemicu resistensi terhadap proyek EBT (Celios, 2024).

Kasus-kasus penolakan yang mencuat di berbagai daerah, seperti di Wae Sano (NTT), Waplasit (Maluku), dan Poco Leok (NTT), menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat lokal. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan partisipatif yang mengedepankan transparansi dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal sebelum memulai proyek pembangunan energi berskala besar (Celios, 2024).

Fenomena serupa terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah pusat melalui Badan Geologi Kementerian ESDM menetapkan wilayah Tandikek-Singgalang sebagai Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) dengan kapasitas pengembangan sebesar 28 MW, yang dikerjakan oleh PT Hitay Balai Kaba Energy. Proyek ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah, namun mendapat penolakan kuat dari masyarakat setempat yang khawatir terhadap dampak ekologis, sosial, dan budaya (Halia Dinan, 2021).

Bagi masyarakat Pandai Sikek, tanah ulayat bukan sekadar lahan fisik tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan yang menyentuh ruang hidup adat harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal. Penolakan terhadap proyek geothermal di wilayah ini mencerminkan konflik kepentingan antara narasi negara yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan persepsi masyarakat lokal yang memandang proyek tersebut sebagai ancaman terhadap lingkungan dan adat (Celios, 2024).

Penelitian mengenai perlawanan masyarakat Pandai Sikek terhadap rencana pembangunan proyek geothermal menjadi penting untuk memahami dinamika resistensi yang terjadi. Dengan menggunakan kerangka teori James C. Scott tentang perlawanan terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi (*hidden transcript*), penelitian ini berupaya mengungkap bentuk-bentuk resistensi masyarakat, baik yang tampak di ruang publik maupun yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari (Susilowati, 2018).

Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam komunikasi dan advokasi kebijakan, serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah dan pengembang proyek dalam merumuskan strategi komunikasi dan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Dengan demikian,

pengelolaan proyek EBT tidak hanya berorientasi pada pencapaian target energi nasional, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekologis di wilayah pelaksanaannya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini untuk menggambarkan secara mendalam dinamika perlawanan masyarakat Pandai Sikek terhadap rencana pembangunan proyek geothermal. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara kontekstual, holistik, dan mendalam, termasuk interaksi antaraktor serta makna yang dikonstruksi oleh masyarakat (Neuman dalam Rahardian & Zarkasi, 2021). Lokasi penelitian berada di Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu titik rencana eksplorasi dan eksploitasi energi panas bumi yang mendapat penolakan kuat dari masyarakat setempat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan fokus penelitian (Sugiyono dalam Imam & Tauran, 2022). Informan terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, perwakilan masyarakat, aktivis lingkungan, aparat pemerintah nagari, serta pihak yang terlibat langsung atau terdampak oleh rencana proyek geothermal. Total terdapat 14 informan yang diwawancarai.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi (Sugiyono dalam Mauliddiyah, 2021). Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode (Sugiyono dalam Khairunisa, 2023).

## **HASIL**

### **Perlawanan Terbuka (public transcript)**

Perlawanan terbuka merupakan salah satu bentuk masyarakat menyampaikan pendapat dan keinginan masyarakat di depan publik agar masyarakat di dengar oleh pihak yang berkuasa. Aksi ini menjadi bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan terkait rencana proyek dapat digagalkan.

Bentuk paling nyata dari perlawanan terbuka adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pandai Sikek yang dilakukan di salah satu rumah warga yang berada di jorong baruah Nagari Pandai Sikek. Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh adat dan masyarakat lainnya. Aksi ini dihadiri lebih kurang sebanyak 80 orang masyarakat Pandai Sikek yang berpartisipasi dalam aksi penolakan ini. Dalam aksi tersebut masyarakat membawa spanduk yang berisi penolakan masyarakat terhadap rencana proyek geothermal di Pandai Sikek, dimana aksi ini juga disebar di media sosial. Aksi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Aksi Penolakan Masyarakat Pandai Sikek  
Sumber : <https://www.instagram.com/pandai.sikek>

Berdasarkan wawancara dengan seorang tokoh masyarakat bahwanya awal mula terjadinya aksi unjuk rasa ini karena beliau tidak mau diajak untuk berdiskusi langsung dengan pihak hitay karena takut disudutkan, hal ini disampaikan seorang tokoh masyarakat dalam wawancara.

*“iyaa saya ikut, karna saya yang mengajak masyarakat untuk melakukan pertemuan di jorong baruah, pada saat itu saya diajak untk berdiskusi dengan wali nagari dan diajak untuk bertemu langsung dengan pihak penyelenggara proyek, lalu saya menolak karena saya takut disudutkan, kemudian saya mengumpulkan masyarakat dan melakukan aksi unjuk rasa penolakan proyek geothermal yang dihadiri lebih kurang 80 orang” (wawancara 16 juli 2025)*

Salah seorang masyarakat juga mengaku melihat adanya masyarakat yang berkumpul di kantor wali nagari untuk bertanya terkait geothermal ini. Hal ini diungkapkan oleh rasyid seorang masyarakat. Melalui wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Wali Nagari Pandai Sikek yaitu Bapak Mas’ap yang mengatakan bahwa aksi ini dipicu karena adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah nagari. Hal ini diungkapkan dalam wawancara.

*“aksi ini dipicu karena kesalahpahaman antara pemerintah nagari dengan masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat berpikir saya pergi ke Jakarta untuk menekan kontrak dengan pihak penyelenggara proyek yaitu PT. Hitay Balai Kaba, padahal saya ke Jakarta untuk berdiskusi dengan perantau, aksi ini terjadi di jorong baruah, dimana awalnya masyarakat meminta untuk berdiskusi dengan saya yang akan dihadiri 15 orang, dan setelah saya pergi ke tempat pertemuan ternyata ada lebih dari 80 org masyarakat berada ditampat pertemuan“ (wawancara 8 agustus 2025).*

Pihak penyelenggara Proyek geothermal yaitu PT. Hitay Balai Kaba sudah mengetahui aksi penolakan dari masyarakat dimana aksi penolakan sudah meluas di media sosial. Terkait dengan aksi penolakan, Pihak Penyelenggara yang diwakili oleh Bapak Jordy Selaku humas dari PT.Hitay Balai Kaba menyatakan bahwa pihak perusahaan mencoba untuk mencari tahu alasan dari penolakan masyarakat, dimana hal tersebut disampaikan dalam wawancara.

*“kalo dari perusahaan sendiri tentunya mencari tahu terlebih dahulu, apa yang menjadi terjadinya aksi penolakan dan siapa saja orang-orang yang melakukan penolakan dan apa rencana yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan untuk merespon aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut”*(wawancara 10 Agustus 2025).

Terkait dengan isi tuntutan masyarakat Pandai Sikek terkait penolakan pembangunan geothermal pada umumnya mengarah kepada isu dampak lingkungan dan ketidakikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dimana tuntutan ini ditulis masyarakat di media sosial. Dan lebih lanjut dari wawancara dengan seorang tokoh masyarakat yang menyampaikan kekhawatiran jika proyek ini berlanjut.

*“isinya terkait penolakan masyarakat Pandai Sikek terhadap geothermal karena kami takut akan dampak lingkungan yang nantinya akan dirasakan anak cucu kami jika proyek ini tetap berjalan karena jangka waktu proyek ini sangat lama, saya khawatir lingkungan ini nantinya akan merugikan anak cucu kami nantinya dan kami berharap proyek ini tidak jadi dilaksanakan”* (wawancara 16 Juli 2025)

Beberapa masyarakat dan pemuda juga menyampaikan kekhawatiran terkait dengan dampak lingkungan, kekeringan, bahkan ketakutan jika terjadi bencana alam. Kekhawatiran ini menjadi alasan utama perlawanan masyarakat terkait dengan rencana proyek geothermal ini. Asumsi masyarakat ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dan dinas terkait. Penolakan terang-terangan juga dilakukan masyarakat seperti yang terjadi pada lebaran Idul Adha dimana masyarakat menyuarakan dengan tegas untuk menolak geothermal yang diumumkan di mesjid dengan menggunakan pengeras suara. Selain aksi tersebut, tokoh masyarakat juga sudah turun tangan dengan membuat surat penolakan geothermal di Pandai Sikek yang ditanda tangani oleh pangulu nan 60. Namun surat penolakan ini belum sampai ke tangan pemerintah nagari tapi informasi ini sudah sampai ke pihak nagari.

Menanggapi aksi penolakan yang dilakukan masyarakat, Bapak Wali Nagari Pandai Sikek menyatakan bahwa setiap keputusan ada di tangan masyarakat, jika masyarakat memutuskan untuk menolak, maka pihak nagari tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan ada ditangan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku dinas yang membantu investor terkait rencana proyek ini memaklumi jika adanya penolakan dari masyarakat Pandai Sikek, namun dari dinas tetap berusaha untuk memulai proyek ini. Menanggapi aksi penolakan masyarakat Pandai Sikek, Dinas DPMPTSP berencana akan melakukan sosialisai lanjutan, namun masih menunggu waktu yang kondusif. Karena aksi penolakan ini tentunya dapat menghambat pelaksanaan proyek geothermal seperti survey lanjutan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muharwan selaku kepala bidang DPMPTSP. Aksi penolakan ini diketahui oleh Dinas DPMPTSP melalui informasi dari pihak hitay, yang mana disampaikan dalam wawancara dengan bapak Gian sebagai salah satu bagian dalam bidang DPMPTSP.

*“informasi nya dari hasil laporan pihak hitay, puncaknya saat ada laporan masyarakat yang sampai ke bupati bahwa hitay telah memancang lahan pertanian penduduk, namun dari hasil klarifikasi hitay itu merupakan kegiatan survey topografi oleh pihak konsultan hitay”* (wawancara 8 Agustus 2025)

Dinas DPMPTSP juga masih menggali informasi lebih dalam terkait aksi penolakan masyarakat. Menanggapi dari aksi penolakan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar juga membentuk Tim

Koordinasi Percepatan Investasi dimana tim ini membantu investor dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan proyek. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan pak gian.

*“...untuk sementara dinas berupaya menggali informasi yang valid baik dari pihak hitay ataupun wali nagari setempat, sambil menunggu redanya aksi penolakan, selain itu pemda juga membentuk Tim Koordinasi Percepatan Investasi di daerah serta memfasilitasi kendala kendala yang dihadapi oleh calon investor” (wawancara 8 agustus 2025).*

Menanggapi kesalahpahaman yang terjadi dengan masyarakat Pandai Sikek, pihak hitay melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menjalin komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman, namun permasalahan internal di Nagari Pandai Sikek cukup menghambat proses tersebut. Hal ini diungkapkan dalam sebuah wawancara dengan pihak hitay.

*“...jadi setelah terjadinya kesalahpahaman, saya melakukan pendekatan dengan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa angku-angku di Pandai Sikek, terutama yang bersinggungan langsung dengan lokasi rencana pengeboran panas bumi, saya sudah melakukan pengenalan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas informasi yang mungkin tidak mengenakan di masyarakat, namun ada beberapa kelompok di masyarakat yang merasa tidak dilibatkan yang bisa dikatakan memiliki perbedaan pandangan” (wawancara 10 agustus 2025).*

Tentunya aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Pandai Sikek mempengaruhi pelaksanaan proyek yang menjadi terhambat. Namun dari pihak penyelenggara akan menanggukkan proyek ini sampai masyarakat reda dan menerima untuk sosialisasi lanjutan. Namun dari pihak penyelenggara juga tidak ada unsur pemaksaan. Aksi penolakan memang murni berasal dari kesalahpahaman dan ketidak terbukaannya masyarakat dengan pihak penyelenggara serta konflik internal masyarakat dengan pemerintah nagari yang sebelumnya sudah ada.

### **Perlawanan Tersembunyi (hidden transcript)**

Selain aksi perlawanan terbuka, masyarakat Pandai Sikek juga melakukan juga melakukan perlawanan tersembunyi sebagai bentuk resistensi yang bersifat terselubung. Perlawanan ini tidak muncul di ruang publik secara formal, namun berlangsung dalam interaksi sehari-hari melalui gosip, sindiran, boikot diam-diam, hingga upaya menghambat kegiatan proyek secara tidak langsung.

Gosip merupakan salah satu utama penyebaran resistensi dan isu-isu mengenai dampak lingkungan. Gosip bisa tersebar dimana saja seperti di warung kopi, ladang, lingkungan masjid, dimana masyarakat saling bertukar cerita tentang potensi bahaya proyek seperti kerusakan hutan, hilangnya sumber air dan ancaman terhadap lahan pertanian bahkan ketakutan akan bencana alam yang timbul akibat proyek ini. Gosip juga berperan sebagai media penyebaran narasi penolakan di masyarakat Pandai Sikek. Hal ini diungkapkan masyarakat dalam wawancara, dimana masyarakat menganggap proyek ini berdampak kepada lingkungan dan beberapa orang juga mengaku telah melakukan survey ke lokasi proyek geothermal yang berada di solok setan untuk membenarkan asumsi yang didapat.

Keraguan masyarakat terhadap keberhasilan proyek geothermal ini juga diungkapkan oleh salah seorang masyarakat. Dimana jika proyek ini gagal tentunya masyarakat yang akan terkena imbasnya. Seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat.

*“...geothermal merusak lingkungan, proyek ini belum dapat izin pemerintah pusat, kami sudah melakukan survey ke solok selatan, namun disana proyeknya cukup jauh dari permukiman masyarakat, sedangkan disini cukup dekat jadi kami takut akan dampak lingkungan dan bencana alam seperti longsor” (wawancara 16 juli 2025)*

Isu-isu yang tersebar di masyarakat yang membangun narasi negatif tentunya sudah diketahui oleh PT.Hitay Balai Kaba, dari pihak hitay sangat ingin untuk meluruskan isu yang tersebar di masyarakat, namun pihak hitay tidak mendapatkan ruang untuk berkomunikasi dengan publik. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan pihak hitay.

*“kami dari perusahaan sudah mengetahui isu-isu yang tersebar dan kami ingin meluruskan tapi tidak mendapatkan ruang, karena pada saat pendekatan dengan tokoh masyarakat di berbagai jorong di Pandai Sikek adanya kelompok berkepentingan yang tidak suka kemudian menyebarkan bahwa pihak perusahaan sudah datang menemui tokoh masyarakat untuk meminta tanda tangan persetujuan, sedangkan masyarakat tidak mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Ketua KAN atau angku angku lainnya. Padahal tujuan pihak hitay hanya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat” (wawancara 10 agustus 2025)*

Selain itu, kegiatan survey topografi yang dilakukan oleh konsultan hitay juga membuat masyarakat kesal karena ada beberapa pancang yang diletakkan oleh pihak hitay di ladang masyarakat. Hal ini menyebabkan timbulnya asumsi di masyarakat bahwa kegiatan proyek sudah mulai dilakukan tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut kepada masyarakat. Beberapa warga juga mengaku bahwa ketidakhadiran dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pandai Sikek merupakan salah satu bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Mengkonfirmasi hal tersebut, pihak hitay mengatakan bahwa sudah memberikan pemberitahuan kepada konsultan untuk tidak melakukan pergerakan apapun di lapangan sebelum adanya persetujuan dari masyarakat Pandai Sikek. Namun pihak konsultan tetap melanjutkan kegiatan pemetaan yang membuat masyarakat makin memanas.

Kesalahpahaman yang terjadi antara masyarakat Pandai Sikek, Pihak Nagari dan PT.Hitay menjadi makin besar dan dari pihak hitay mencoba untuk melakukan pendekatan agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat, namun beberapa masyarakat menunjukkan sikap yang menerima kedatangan dari pihak hitay namun dibalik itu mereka menolak proyek ini dan membicarakan dengan masyarakat lain, sehingga menimbulkan kesalahpahaman lainnya di masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap bahwa pihak nagari dan KAN sudah bekerja sama dengan PT.Hitay dengan alasan memfasilitasi hitay, padahal kedatangan dari pihak hitay hanya murni untuk melakukan perkenalan dengan masyarakat guna untuk meluruskan beberapa kesalahpahaman yang sudah tersebar.

Isu-isu yang tersebar di masyarakat Pandai Sikek yang mulai memanas, Bapak Mas'ap selaku Wali Nagari Pandai Sikek menanggapi hal ini sebagai hal yang wajar karena minimnya sosialisasi dan masyarakat yang umumnya masih awan. Dimana disampaikan bapak mas'ap dalam wawancara.

*“...sebenarnya gossip atau isu yang tersebar merupakan hal yang wajar, karena masyarakat Pandai Sikek sendiri belum paham mengenai geothermal ini, ditambah belum adanya sosialisasi mendalam, sebelumnya hanya dilakukan sosialisasi satu kali antara beberapa orang masyarakat dengan pihak penyelenggara yaitu PT. Hitay Balai Kaba di kantor wali nagari” (wawancara 8 agustus 2025).*

Bapak Mas'ap juga mengatakan bahwa masyarakat saat ini sangat kritis jika itu terkait rencana proyek geothermal. Dimana hal ini dirasakan oleh Wali Nagari Pandai Sikek ketika melakukan diskusi atau obrolan dengan masyarakat. Bapak Yalfiza selaku Kaur Perencanaan Nagari Pandai Sikek juga mengatakan bahwa isu yang ada di masyarakat belum tentu benar karena masyarakat sangat mudah dipengaruhi oleh berita hoax. Mengetahui isu-isu negatif yang tersebar di masyarakat Pandai Sikek, Dinas DPMPTSP menanggapi isu tersebut terjadi karena masyarakat tidak bisa memilah informasi. Yang mana disampaikan dalam wawancara.

*"...dinas mengetahui isu-isu yang berkembang terkait dampak negative dari kegiatan PLTP, seperti hadirnya pertanyaan pertanyaan seputar isu kebencanaan akibat PLTP pada acara sosialisasi baik di pandai sikek maupun di koto laweh, seperti yang kita ketahui bahwa peran media sosial yang masih massif memberikan informasi hoax tanpa ada dasar ilmiah, sehingga masyarakat awam mudah untuk dipengaruhi"* (wawancara 8 agustus 2025).

Isu-isu yang telah tersebar membuat pelaksanaan proyek menjadi terhambat, Dinas DPMPTSP mengatakan jika ada rencana terkait sosialisasi lanjutan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Hal ini diungkapkan oleh bapak gian dalam wawancara.

*"...isu yang beredar tentu diperlukan sinergi dari kedua pihak yaitu hitay dan pemda, tidak hanya pemkab tanah datar, provinsi bahkan kementerian terkait juga diperlukan kontribusinya terutama dalam kegiatan sosialisasi dalam rangka mengedukasi masyarakat dan meredam isu isu hoax"*.

Untuk mengklarifikasi isu yang telah tersebar di masyarakat Pandai Sikek. Dan untuk kegiatan teknis akan dilakukan oleh hitay sebagai pihak penyelenggara proyek. Pemerintah Daerah akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dimana kegiatan sosialisasi ini akan didampingi oleh Tim KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Gian dalam wawancara.

*"...kalau untuk yang sifatnya teknis mungkin dinas tidak memiliki kompetensi di bidang itu, mungkin ditekankan kepada hitay dalam memberikan sosialisasi. Kedepannya setiap kegiatan sosialisasi oleh hitay akan selalu didampingi oleh pemda melalui tim KPI, dengan itu diharapkan memberikan rasa aman dan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat merasa didampingidalam kegiatan investasi ini"*. (wawancara 8 agustus 2025).

Menanggapi isu-isu mengenai dampak lingkungan yang tersebar di masyarakat Pandai Sikek, Pihak Hitay menjelaskan jika setiap isu yang ditakutkan masyarakat tentunya dari perusahaan sudah ada mitigasinya dan Standar Operasiona Perusahaan, seperti isu terkait kekeringan karena pengeboran yang mana hal ini dijelaskan dalam wawancara.

*"Terkait dengan isu dimasyarakat terkait kekeringan karena pengeboran yang dalam, sedangkan itu tidak mungkin karena pengeboran maksimal 100 meter di bawah permukaan, dan pengeboran tidak mencampurkan dengan air permukaan, nantinya akan di cover dengan pipa baja anti panas, dan jika pengeboran yang 100 meter itu kemasukan air dari permukaan maka akan mengurangi panasnya dari sumber panas yang kami gunakan untuk pembangkit panas bumi, jadi kami tidak akan membiarkan air di permukaan masuk ke dalam sumur bor, karena jika air permukaan masuk makan panas dari sumur bor tidak bisa kami gunakan untuk pembangkit listrik"* (wawancara 10 Agustus 2025).

Selain isu mengenai kekeringan, kekhawatiran masyarakat juga dikarenakan isu bencana alam seperti lumpur lapindo, serta isu terkait polusi udara yang ditakutkan oleh masyarakat Nagari Pandai Sikek, menanggapi isu ini pihak hitay juga sudah menjelaskan dalam wawancara.

“...terkait isu mengenai lumpur lapindo, itu tidak mungkin karena lumpur Lapindo berada di dataran rendah sedangkan proyek ini berada di dataran tinggi, jadi karakteristik batuan dan karakteristik tanah itu sangat berbeda, terkait isu mengenai polusi udara, sebenarnya tiap daerah apalagi sekitaran gunung itu memang mengandung hydrogen sulfida, hydrogen sulfida dianggap berbahaya jika telah melebihi batas terhirup oleh manusia, dan dalam pengeboran sumur apalagi di daerah gunung akan ada kemungkinan hydrogen sulfida terbawa karena sudah alamiah di gunung, tapi dengan adanya teknologi sekarang bisa dikontrol dengan menggunakan sensor yang memiliki katup di pipa, sensor itu akan menutup sendiri jika sudah cukup, jadi hydrogen sulfida tidak akan keluar, jadi isu air, udara dan isu Lapindo tidak ada, dan yang berkemungkinan ada itu adalah hydrogen sulfida yang merupakan alamiah di gunung, tapi hal tersebut sudah ada mitigasinya, bisa dikatakan jika perusahaan bekerja dengan SOP yang sesuai standar dan tidak ada human erorr, maka tidak akan ada dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitarnya” (wawancara, 10 Agustus 2025).

Mengenai isu-isu yang tersebar di masyarakat tentunya sudah ada mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ditambah dengan semakin berkembangnya teknologi, maka setiap proses dalam proyek tentunya dapat diminimalisir resikonya.

## PEMBAHASAN

### Perlawanan Terbuka (*public transcript*)

Perlawanan terbuka yang dilakukan oleh masyarakat Pandai Sikek terhadap rencana proyek eksplorasi dan eksploitasi panas bumi merupakan bentuk resistensi yang jelas terlihat di ruang publik, selaras dengan konsep public transcript yang dikemukakan James C. Scott (2000). Scott menjelaskan bahwa perlawanan terbuka dilakukan secara kolektif, terorganisir, serta memiliki tujuan untuk menghapuskan tindakan dominasi. Dalam konteks ini, aksi unjuk rasa, pemasangan spanduk penolakan, dan penyebaran sikap melalui media sosial menjadi wujud nyata perlawanan yang kasat mata dan ditujukan langsung kepada pihak berkuasa, baik pemerintah maupun perusahaan pelaksana proyek. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara yang konfrontatif namun terarah, mengacu pada empat ciri utama perlawanan terbuka yang diuraikan Scott.

Keterlibatan beragam elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemuda, hingga ibu rumah tangga, memperlihatkan terbentuknya solidaritas kolektif dalam menghadapi isu yang dianggap mengancam kelestarian lingkungan dan identitas kultural mereka. Menurut Barnard & Jonathan (dalam Komorina & Utami, 2017), resistensi sering muncul ketika kelompok subordinat menghadapi kebijakan atau tindakan dari kelompok dominan yang berpotensi merugikan, sementara mereka tidak memiliki kekuatan struktural yang memadai. Dalam kasus Pandai Sikek, ketiadaan mekanisme partisipasi bermakna membuat aksi massa menjadi satu-satunya saluran efektif untuk menyuarakan aspirasi.

Motif utama perlawanan ini terkait dengan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek panas bumi, seperti kerusakan hutan, kekeringan, dan longsor, yang dianggap akan merugikan anak cucu di masa depan. Kekhawatiran ini diperkuat oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dan perusahaan, sehingga ruang dialog menjadi sangat terbatas. Situasi ini

selaras dengan pandangan Siahaan dalam Alisjahbana (2005) bahwa resistensi masyarakat bukanlah provokasi, melainkan reaksi akibat keterbatasan akses pada saluran formal penyampaian aspirasi.

Nilai-nilai adat Minangkabau, seperti Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, menjadi landasan moral bagi gerakan perlawanan terbuka. Tanah ulayat sebagai warisan leluhur memiliki dimensi identitas yang kuat, sebagaimana dikemukakan Durkheim (Tejokusumo, 2014) bahwa masyarakat membentuk sistem sosial yang terikat oleh nilai bersama. Penolakan proyek geothermal diartikan sebagai upaya mempertahankan harmoni sosial, ekologis, dan kultural yang sudah berlangsung turun-temurun, sehingga legitimasi gerakan perlawanan tidak hanya bersumber dari kepentingan praktis, tetapi juga dari norma adat yang mengikat.

Aksi perlawanan terbuka ini juga mengandung pesan simbolis yang kuat. Unjuk rasa di ruang publik dan pengumuman di masjid menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan arena komunikasi yang memiliki legitimasi sosial. Menurut Soerjono Soekanto (Tejokusumo, 2014), interaksi sosial dalam masyarakat berlangsung melalui mekanisme yang diakui bersama. Dengan memanfaatkan ruang-ruang yang menjadi pusat interaksi sosial, pesan penolakan menjadi lebih mudah diterima dan dimaknai secara kolektif oleh komunitas.

Kondisi di Pandai Sikek memperlihatkan bahwa perlawanan terbuka tidak hanya bertujuan menghentikan proyek, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kohesi sosial. Solidaritas yang terbentuk dalam aksi ini menunjukkan bahwa resistensi dapat berperan sebagai pemersatu masyarakat, terutama ketika mereka merasa menghadapi ancaman bersama. Ini sejalan dengan Scott yang menekankan bahwa public transcript kerap menguatkan identitas kelompok subordinat di hadapan dominasi.

Dari perspektif kebijakan publik, perlawanan terbuka ini mencerminkan adanya jarak antara pendekatan teknokratis pemerintah yang fokus pada target bauran energi EBT sesuai PP No. 79 Tahun 2014 dan Perda Sumbar No. 11 Tahun 2019 dengan kebutuhan akan pendekatan partisipatif yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya. Kegagalan untuk menjembatani jarak ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan energi terbarukan, bahkan di wilayah dengan potensi besar seperti Pandai Sikek.

### **Perlawanan Tersembunyi (*hidden transcript*)**

Selain resistensi yang kasat mata, masyarakat Pandai Sikek juga melakukan perlawanan tersembunyi atau hidden transcript, yaitu bentuk resistensi yang berlangsung di luar ruang publik formal, bersifat individual atau kelompok kecil, dan tidak terorganisir secara resmi. James C. Scott (2000) mendefinisikan hidden transcript sebagai ekspresi oposisi yang disampaikan melalui simbol, gosip, sindiran, atau tindakan pasif yang bertujuan menghambat kebijakan tanpa konfrontasi langsung. Di Pandai Sikek, bentuk ini terlihat melalui penyebaran gosip di warung kopi, ladang, atau lingkungan masjid, yang memuat narasi ancaman lingkungan, kekeringan, hingga analogi dengan bencana Lumpur Lapindo.

Penyebaran gosip ini memiliki efek kumulatif yang signifikan. Menurut Siahaan dalam Alisjahbana (2005), resistensi kelompok subordinat sering kali muncul karena keterbatasan akses pada saluran formal, sehingga mereka mengandalkan jalur informal untuk mempertahankan posisi tawar. Dalam konteks Pandai Sikek, jalur informal ini bukan hanya menjadi medium penyampaian informasi, tetapi juga membentuk opini kolektif yang memperkuat sikap penolakan terhadap proyek. Hal ini menjadikan hidden transcript sebagai kekuatan laten yang dapat menghambat legitimasi proyek di mata masyarakat.

Isu-isu yang beredar sering kali bersifat spekulatif dan tidak sepenuhnya didasarkan pada data ilmiah, seperti asumsi bahwa pengeboran akan menyebabkan kekeringan atau memicu longsor. Namun, tanpa adanya klarifikasi yang memadai, isu ini berkembang menjadi narasi dominan yang membentuk persepsi publik. Durkheim (Tejokusumo, 2014) menekankan bahwa kesadaran kolektif terbentuk melalui interaksi sosial, dan dalam hal ini, interaksi di ruang-ruang informal telah membentuk kesadaran kolektif penolakan proyek.

Tindakan pasif seperti tidak hadir dalam sosialisasi atau pertemuan yang diadakan oleh pihak proyek juga menjadi bagian dari perlawanan tersembunyi. Soerjono Soekanto (Tejokusumo, 2014) menjelaskan bahwa interaksi sosial tidak selalu berbentuk partisipasi aktif; penarikan diri dari partisipasi pun dapat dimaknai sebagai bentuk komunikasi non-verbal yang menyampaikan penolakan. Dalam kasus Pandai Sikek, absensi ini menandakan sikap "menahan diri" sambil tetap menjaga hubungan sosial sehari-hari.

Hidden transcript juga terlihat dari tindakan masyarakat yang secara diam-diam mempersulit akses proyek, misalnya dengan menolak memberikan informasi atau izin penggunaan lahan untuk survei. Barnard & Jonathan (Komorina & Utami, 2017) menekankan bahwa resistensi seperti ini adalah strategi bertahan hidup kelompok subordinat yang ingin meminimalkan kerugian tanpa harus menanggung risiko konfrontasi langsung. Strategi ini memungkinkan mereka mempertahankan posisi tawar sambil menghindari represi.

Perlawanan tersembunyi ini memiliki dinamika yang saling berkaitan dengan perlawanan terbuka. Ketika aksi terbuka terhenti karena faktor tertentu, hidden transcript tetap berlanjut di bawah permukaan dan menjaga semangat penolakan tetap hidup. Scott menyebut hal ini sebagai "arsip memori kolektif" yang dapat diaktifkan kembali ketika situasi memungkinkan. Di Pandai Sikek, gosip dan isu yang beredar berfungsi sebagai pengikat narasi penolakan lintas generasi, terutama dengan menekankan ancaman terhadap anak cucu.

Dari perspektif implementasi kebijakan, keberadaan hidden transcript yang kuat menunjukkan bahwa upaya mitigasi resistensi tidak cukup hanya dengan sosialisasi teknis. Dibutuhkan pendekatan yang melibatkan pemimpin opini lokal, mengakui kekhawatiran masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan, dan membangun komunikasi dua arah yang konsisten. Tanpa itu, resistensi laten akan terus mempengaruhi legitimasi dan kelancaran proyek, meskipun secara formal pemerintah telah memenuhi prosedur administratif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlawanan masyarakat Nagari Pandai Sikek terhadap rencana eksplorasi dan eksploitasi panas bumi terbagi menjadi dua bentuk utama sesuai teori James C. Scott, yakni perlawanan terbuka dan perlawanan tersembunyi. Perlawanan terbuka diwujudkan melalui aksi unjuk rasa, pemasangan spanduk penolakan, penyampaian aspirasi di ruang publik, serta pembuatan surat penolakan yang didukung oleh tokoh adat. Sementara itu, perlawanan tersembunyi berlangsung dalam bentuk gosip, sindiran, boikot diam-diam, dan penyebaran isu negatif terkait potensi dampak proyek terhadap lingkungan dan sosial budaya. Faktor pendorong resistensi meliputi kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air, potensi bencana, ancaman terhadap keberlangsungan tanah ulayat, minimnya sosialisasi, serta ketidaklibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Konflik internal antara sebagian kelompok masyarakat dengan pemerintah nagari turut memperkuat penolakan. Pola resistensi ini sejalan dengan konsep perlawanan

Scott, di mana kelompok subordinat menggunakan strategi baik di ruang publik maupun secara terselubung untuk mempertahankan ruang hidup dan kearifan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi proyek energi baru terbarukan, khususnya panas bumi, tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga pada kemampuan membangun komunikasi yang transparan, partisipasi bermakna, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Agustiyar, F., Siahaan, B., Wahyuzar, D., & Wirandoko, H. (2022). Kajian Potensi Panas Bumi Sebagai Renewable Energy dan Pemanfaatannya pada Daerah Prospek Panas Bumi Gunung Telomoyo Magelang. *Jurnal Offshore: Oil, Production Facilities and Renewable Energy*, 6(2), 85–95.
- Celios, W. &. (2024). *Geothermal Di Indonesia*.
- Halia Dinan, U. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Eksploitasi Panas Bumi Di Wilayah Kerja Pertambangan Kaldera Rawa Danau. *Jurnal Community Online*, 2(2), 25–38. <https://doi.org/10.15408/jko.v2i2.28278>
- Imam, M. F., & Tauran, T. (2022). Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Studi Kasus Idfos Indonesia). *Publika*, 1331–1346. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1331-1346>
- J. Onibala, J.H.Posumah, V. L. (2022). Dampak Kebijakan Sosial Ekonomi dan Lingkungan PT. Geothermal Bagi Masyarakat Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrai Publik (JAP)*, VIII(3), 162–169.
- Khairunisa, S. (2023). Advokasis Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Di Kabupaten Langkat.
- Komorina, S. R., & Utami, D. (2017). Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. *Artikel*, 05(01), 1–6.
- Mahdi, Z. (2021). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Perlawanan Masyarakat terhadap Pembangunan Geothermal di Kawasan Dieng Community Resistance to Geothermal Development in the Dieng Area. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2), 209–224. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.5001>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *Analisis Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemaslahatan Perkembangan Umkm Di Gampong Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh*.
- Musyahar, G., Satria, N., Elektronika, T., & Muhammadiyah, P. (2019). Pemanfaatan Geothermal dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. 4(1), 11–17.
- Rahardian, R., & Zarkasi, I. F. (2021). Jejaring Aktor Dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan Dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya Dan Beracun. *Jurnal Identitas*, 1(2), 26–38. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.143>
- Sarante, J. (2024). Energi Baru Dan Terbarukan (Ebt) Sebagai Teknologi Alternatif Dimasa Depan Dalam Mendukung Pertahanan Negara. In *Ditekindhan, Ditjen Pothan Kemhan*. <https://www.kalderanews.com/2020/05/apa-sih-bedanya-energi-baru-dan-terbarukan/>
- Susilowati, E. Z. (2018). Resistensi Tandak. *Bapala*, 5(2), 1–11.

- Sastra Hadi, E., & Vidya Putra, E. (2019). Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Di Gunung Talang Kabupaten Solok. *Jurnal Perspektif*, 2(3), 236. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.95>
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Geodukasi*, 1(1), 38-43.

#### Web

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (n.d.). *Potensi Panas Bumi di Indonesia*. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Diakses pada 10 Januari 2025, dari <https://ebtke.esdm.go.id/lintas/id/investasi-ebtke/sektor-panas-bumi/potensi>
- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). (n.d.). *Potensi energi panas bumi di Indonesia*. Diakses pada 8 Januari 2025, dari <https://ebtke.esdm.go.id/lintas/id/investasi-ebtke/sektor-panas-bumi/potensi>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024, September 18). *Kementerian ESDM kejar tambahan 90 MW dari panas bumi*. Diakses pada 8 Januari 2025, dari <https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-kejar-tambahan-90-mw-dari-panas-bumi>